



BUPATI MALUKU TENGGARA

SEJARAH SINGKAT PEMBENTUKAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Wilayah Maluku Tenggara pada zaman Penjajahan Belanda, tercakup dalam jenis/bentuk Organisasi yang diberi nama "*Recht Streek Bestur de Gabieden*" bersama – sama dengan Maluku Tengah dan Kota Ambon serta dikenal dengan "*Residentie De Zuit Molukken*".

Elat di Pulau Kei Besar dikenal dengan "*Bestuur resort*".

Tual dikepalai oleh "*Hoft Van Plaasselyk*" atau Kepala Pemerintahan Setempat (KPS).

Kota Tual pada tahun 1948 adalah Ibu Kota "*Onder Afdeling Kei – Eenlanden*" yang dikepalai oleh seorang asisten Residen.

I. MASA PASCA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945

Pada masa Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, Provinsi Maluku hanya terbagi atas 2 (dua) Daerah Swatantra yaitu Daerah Maluku Utara dan Daerah Maluku Selatan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Maluku Selatan dilengkapi dengan sebuah Dewan yang disebut Dewan Maluku Selatan (DMS) yang beranggotakan 30 (*tiga puluh*) Orang, 8 (*delapan*) Orang diantaranya dari Maluku Bagian Tenggara dan Selatan Daya, yaitu:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. ABRAHAM KOEDOEBOEN | (DARI KEI BESAR) |
| 2. VENANSIUS RAHAIL | (DARI KEI BESAR) |
| 3. Hi. ABDUL GANI RENUAT | (DARI KEI KECIL) |
| 4. BON SETITIT / PASTOR E. YAMCO | (DARI KEI KECIL) |
| 5. CHRISTIAN BARENDS | (DARI KEP. ARU) |
| 6. ABDULLAH SOLISA/ADJID LATUCONSINA | (DARI KEP. TANIMBAR) |
| 7. DANIEL TEURUPUN | (DARI KEP. BABAR) |
| 8. YACOB NORIMARNA | (DARI KEP. KISAR) |

A. Separatis RMS.

Sebagai akibat dari penerapan sistim Negara Federal, maka terbuka peluang bagi munculnya separtisme Daerah yang mengancam Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tanggal 25 April 1950 Separatis Republik Maluku Selatan memproklamirkan dirinya sebagai Negara Merdeka, terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Wilayah Kekuasaan mencakup seluruh Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara.

Hal tersebut membawa dampak yang besar bagi keamanan Negara khususnya stabilitas Pemerintahan di Maluku, sehingga caplokkan sepihak Separatis RMS atas daerah Maluku Tenggara tidak diterima oleh Tokoh / Pemuka Masyarakat Maluku Tenggara.

B. Pembubaran Daerah Maluku Selatan

Pada bulan April 1951 seluruh Anggota DMS Termasuk Kelompok 8 DMS dari Maluku Tenggara diundang ke Ambon untuk mengadakan Sidang membahas masalah-masalah aktual yang terjadi, Karena Kondisi Saat itu tidak memungkinkan (*setelah Proklamasi RMS*) maka Sidang dibatalkan dan diselenggarakannya suatu rapat mendadak oleh Gubernur Maluku yang dihadiri Staf Gubernur, Anggota DMS dan lain-lain, diantaranya Anggota dari Maluku Tenggara yaitu :

1. Abraham Koedoeboen (dari Kep. Kei)
2. Hi. Abdul Gani Renuat (dari Kep. Kei)
3. Rakib Nukuhehe (dari Kep. Aru)
4. Vitalis Futwembun (dari Kep. Tanimbar)
5. Simon Poroew (dari Kep. Kisar)

Dalam rapat tersebut Gubernur Maluku (M.J. LATUHARIHARI) mengemukakan likuidasi / Pembubaran Daerah Maluku Selatan termasuk alat kelengkapannya seperti DMS.

C. Resolusi Kelompok 8 DMS

Walaupun pada saat itu ada ancaman perpecahan di kalangan kelompok 8 DMS, namun pada akhirnya mereka sependapat untuk

memanfaatkan kesempatan pembubaran Daerah Maluku Selatan ini sebagai momentum bagi penyampaian aspirasi Rakyat melalui suatu Resolusi yang isinya antara lain :

1. Sejalan dengan pembubaran Daerah Maluku Selatan, maka perlu dibentuk Daerah (DATI II) Maluku Tenggara dengan wilayah meliputi : Kep. Kei, Kep. Aru, Kep. Tanimbar, Kep. Babar, dan Kepulauan Selatan Daya (Lemola, Kaisar, dan sebagainya) Dengan Ibukota berkedudukan di Tual.
2. Menunjuk **BITIK SUTAN TJANIAGO** sebagai Bupati Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

II. KESEPAKATAN KASIMBAR

Sebagai realisasi dari resolusi dan perundingan-perundingan yang dilakukan itu, maka pada akhir Bulan Nopember sampai awal Desember 1951, Gubernur Maluku mengadakan Kunjungan Kerja ke Maluku Tenggara, dimulai dari Kepulauan Selatan Daya (Kisar), Tapa, Saumlaki, Dobo dan Tual.

Bersamaan dengan kunjungan dimaksud para Pemuka Masyarakat setiap Wilayah diundang untuk menghadiri Konferensi / Rapat yang dilaksanakan diatas Geladak KM. KASIMBAR pada Tanggal, 10 Desember 1951 di Tual. Pemuka Masyarakat Maluku Tenggara yang hadir saat itu adalah :

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Abraham Koedoeboen | (Parkindo – Kep. Kei) |
| 2. Muhidin Madubun | (Masyumi – Kep. Kei) |
| 3. Ambarak Renwarin | (Masyumi – Kep. Kei) |
| 4. Hi. Abdul Gani Renuat | (P N I – Kep. Kei) |
| 5. Ph. Renyaan | (P. Katholik – Kep. Kei) |
| 6. Piet Tethool | (P. Katholik – Kep. Kei) |
| 7. Simon Poroew | (Parkindo – Kep. Kisar) |
| 8. M. Moses | (Parkindo – Kep. Kisar) |
| 9. Vitalis Futwembun | (P. Katholik – Kep. Tanimbar) |
| 10. J. Bonara | (Kep. Aru dan Kep. Babar) |

Walaupun pembicaraan disepatar permasalahan tersebut berjalan alot, namun akhirnya dapat dicapai suatu kesepakatan bahwa Gubernur Maluku dapat merekomondir terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara dengan Ibukota berkedudukan **di Tual.**

III. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1952 TENTANG PEMBUBARAN DAERAH MALUKU SELATAN DAN PEMBENTUKAN DAERAH MALUKU TENGAH DAN MALUKU TENGGARA, SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSIONAL PEMBENTUKAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Setelah melalui proses pertimbangan yang matang di Tingkat Pemerintah Pusat, pada akhirnya ditetapkan suatu Keputusan Politik yang penting yaitu **Pembubaran Daerah Maluku Selatan** dan **Pembentukan Daerah Tingkat II Maluku Tengah** dan **Maluku Tenggara**, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 Tertanggal, 12 Agustus 1952.

Dengan demikian Tanggal 12 Agustus 1952 merupakan salah satu Tonggak Sejarah yang penting bagi Daerah ini, yaitu saat dimana secara Deyure Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara disetujui pembentukannya.

Berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 1952, pada Bab II, Pemerintahan Daerah pasal 3 ayat 1 dan 3, **tentang Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD)**, maka langkah – langkah persiapan kearah penyelenggaraan pemerintahan pun diambil antara lain :

1. Pembentukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) Tingkat II Maluku Tenggara dengan jumlah kursi sebanyak 20 dengan pembagian sebagai berikut :

PARKINDO	: 8 KURSI
MASYUMI	: 4 KURSI
PARTAI KATOLIK	: 4 KURSI
PNI	: 2 KURSI
PSII	: 1 KURSI
PARTAI BURUH	: 1 KURSI

2. Pembentukan Dewan Pemerintah Daerah Sementara (DPDS) Tingkat II Maluku Tenggara, dengan jumlah Anggota sebanyak 5 orang terkecuali kepala daerah. Dengan anggota adalah sebagai berikut :

1. Piet Tethool
2. E. Borut
3. W. Kuway.

4. S. Poru

IV. DIMULAINYA RODA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Setelah adanya persiapan **kelengkapan Lembaga Pemerintahan Daerah** tersebut yakni **Anggota DPRDS dan DPDS Tingkat II Maluku Tenggara**, maka **proses Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara sampai pada puncaknya** dengan **dilaksanakan Pelantikan Anggota DPRDS dan DPDS Daerah Tingkat II Maluku Tenggara pada Tanggal 22 Desember 1952**, oleh **Resident Djosan**, mewakili Gubernur Maluku J.J. Latuharhary, SH.

Dalam pelantikan tersebut, sekaligus dilakukan sidang perdana yang dilaksanakan di Gedung Madrasah Wara, dibahas satu agenda pokok yaitu Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPRDS, A.n : **Saudara Abraham Koedubun** sebagai ketua dan **Steven Noya** Wakil Ketua DPRDS Maluku Tenggara.

Sehubungan dengan itu maka **tanggal 22 Desember 1952** merupakan hari dimana **secara formal** roda Pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara **mulai digerakan**

Proses sejarah kelahiran Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara itu kemudian lebih dikukuhkan secara konstitusional pada tahun 1958, dengan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku.

V. MALUKU TENGGARA PASCA PEMEKARAN WILAYAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, Maluku Tenggara dengan Ibu Kota Tual, membawahi 8 (*delapan*) Kecamatan yakni :

1. Kecamatan P. P. Terselatan
2. Kecamatan Leti, Moa, Lakor
3. Kecamatan P. P. Babar
4. Kecamatan Tanimbar Selatan
5. Kecamatan Tanimbar Utara
6. Kecamatan Kei Kecil
7. Kecamatan Kei Besar

8. Kecamatan P. P. Aru

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan keinginan guna memperpendek rentang kendali pemerintahan, maka muncul aspirasi sebagian masyarakat Maluku Tenggara untuk memekarkan diri dari Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai berikut :

1. Tahun 2000, Pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Tahun 2003, Pembentukan Kabupaten Kepulauan Aru;
3. Tahun 2007, Pembentukan Kota Tual;

Dengan demikian, maka Kabupaten Maluku Tenggara Pasca Pemekaran Kota Tual, memiliki **6 (enam) Kecamatan, 86 Ohoi Orong Kai** dan **104 Ohoi Soa** dengan luas wilayah : 7.856,70 KM² (*tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam koma tujuh puluh kilo meter bujur sangkar*) dengan luas daratan : 4.676,00 KM² (*empat ribu enam ratus tujuh puluh enam koma nol nol kilo meter bujur sangkar*) dan luas perairannya : 3.180,70 KM² (*tiga ribu seratus delapan puluh koma tujuh puluh kilo meter bujur sangkar*).

Sehubungan dengan **Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara yakni Kota Tual** berada dalam **wilayah Otonom Kota Tual**, maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara **merasa perlu untuk segera memindahkan Ibu Kota** Kabupaten Maluku Tenggara **ke wilayah otonomi** Kabupaten Maluku Tenggara.

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara setelah melalui suatu proses yang panjang sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENERBITKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2011 TANGGAL 20 JULI 2011 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN MALUKU TENGGARA DARI WILAYAH KOTA TUAL KE WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU**, dengan Ibu Kota berkedudukan di **LANGGUR**.

Pada tahun 2013, Kabupaten Maluku Tenggara melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, membawahi 11 Kecamatan yakni :

1. Kecamatan Kei Kecil
2. Kecamatan Manyeuw
3. Kecamatan Hoat Sorbay
4. Kecamatan Kei Besar
5. Kecamatan Kei Besar Utara Barat
6. Kecamatan Kei Besar Selatan
7. Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
8. Kecamatan Kei Kecil Timur
9. Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
10. Kecamatan Kei Kecil Barat
11. Kecamatan Kei Besar Utara Timur

Dengan 190 (seratus sembilan puluh) Ohoi dan 1 (satu) Kelurahan

I. PENUTUP

Demikian Sejarah Singkat Pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara.

Langgur, 22 Desember 2019
BUPATI MALUKU TENGGARA,

M. THAHER HANUBUN